

Faktor-Faktor Determinan Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan

Reyshi Reshita Pangala, Basri Bado, Abd Rahim, Citra Ayni Kamaruddin, Irwandi
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas
Negeri Makassar

Diterima: 14 Juni, 2025 | Revisi: 15 Maret, 2026 | Disetujui: 17 Maret 2026 | Diterbitkan: 20
April 2025

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi terjadi disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti derajat otonomi fiskal daerah, rasional pajak, produktivitas tenaga kerja, investasi dan indeks pembangunan manusia. Namun, ditengah pertumbuhan ekonomi tersebut, ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan di berbagai wilayah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang ukuran dimana faktor-faktor ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan antar daerah. Untuk menentukannya, data sekunder dalam format deret waktu dari lima distrik selama periode 2014-2023 dianalisis menggunakan metode analisis jalur menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Analisis dilakukan dengan menguji efek langsung dan tidak langsung dari variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagian besar juga mempengaruhi kesetaraan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Sementara indeks pembangunan manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja memiliki dampak besar pada pengurangan ketidaksetaraan, otonomi fiskal dan investasi adalah faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Derajat Otonomi Fiskal Daerah, Rasional Pajak, Produktivitas Tenaga Kerja, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia.

ABSTRACT

Economic growth occurs due to a number of factors, such as the degree of regional fiscal autonomy, tax rationality, labor productivity, investment, and the human development index. However, amidst this economic growth, income inequality still remains a problem in various regions, including South Sulawesi Province. This raises questions about the extent to which these factors influence economic growth and the imbalance in income distribution across regions. To determine this, secondary data in a time series format from five districts over the period 2014-2023 were analyzed using path analysis methods with SmartPLS software. The analysis was conducted by testing the direct and indirect effects of independent variables on economic growth and income inequality. The results of the study show that all independent variables contribute significantly to economic growth, and most also affect equality.

Keywords: Economic Growth, Income Inequality, Degree of Regional Fiscal Autonomy, Tax Rationality, Labor Productivity, Investment, and Human Development Index.

How to Cite:

Pangala, R. R. ., Bado, B. ., Rahim, A. ., Kamaruddin, C. A. ., & Irwandi. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan ketimpangan Di Provinsi Sulawesi Selatan . JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan). Retrieved from <https://jdep.upnjatim.ac.id/index.php/jdep/article/view/818>

*Corresponding Author:

Email : reyshireshita20@gmail.com
Alamat : Jl. A.P. Pettarani, Kelurahan Tidung,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan 90245



This article is published under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia telah banyak dilakukan, namun penelitian yang secara spesifik menempatkan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konteks perbandingan antar provinsi masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menganalisis ketimpangan pada tingkat nasional atau hanya fokus pada hubungan langsung antara pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan, tanpa memperhatikan posisi relatif suatu provinsi dibandingkan wilayah lain.

Secara empiris, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki karakteristik ekonomi yang tidak ekstrem. Nilai Gini Ratio Sulawesi Selatan berada dalam kategori sedang, lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi di Pulau Jawa yang memiliki PDRB besar, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, namun lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi di Kalimantan yang memiliki tingkat ketimpangan relatif rendah. Di sisi lain, PDRB Sulawesi Selatan tergolong menengah secara nasional, lebih tinggi dibandingkan sebagian besar provinsi di kawasan timur Indonesia, tetapi masih jauh di bawah provinsi-provinsi dengan basis industri dan jasa yang kuat (BPS, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya PDRB tidak otomatis berkorelasi dengan rendahnya ketimpangan pendapatan, khususnya di Sulawesi Selatan.

Penelitian sebelumnya di Sulawesi Selatan, seperti yang dilakukan oleh (Nursa Fitri, Zakaria, dan Hasbi 2021), menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu mengurangi disparitas pendapatan antar kabupaten/kota. Penelitian tersebut belum menghubungkan temuan dengan konteks perbandingan lintas provinsi, sehingga tidak dapat menjelaskan apakah pola yang terjadi di Sulawesi Selatan bersifat khas atau justru mengikuti tren nasional. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih mengambil pendekatan parsial dan belum mengintegrasikan faktor-faktor struktural seperti kapasitas fiskal daerah, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan kualitas pembangunan manusia dalam kerangka analisis yang utuh Firmansyah, 2022; Nugroho et al., 2020).

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya research gap yang signifikan, yaitu belum tersedianya kajian empiris yang secara simultan menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan serta menempatkannya dalam perbandingan antarprovinsi berdasarkan indikator Gini Ratio dan PDRB. Tanpa perspektif komparatif, pemahaman terhadap efektivitas pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan menjadi kurang komprehensif dan berpotensi menimbulkan bias dalam perumusan kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Sulawesi Selatan adalah salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, sehingga ketimpangan pendapatan yang masih ada bisa berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan menganalisis dinamika pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan serta membandingkannya dengan provinsi lain di Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi dan karakteristik pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini tidak hanya penting secara akademis untuk memperkaya literatur, tetapi juga secara

praktis menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan adil.

Urgensi penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada posisi uniknya dalam lanskap ekonomi nasional. Berdasarkan data perbandingan antarprovinsi, Sulawesi Selatan menunjukkan dinamika yang anomali jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Pada tahun 2017, Sulawesi Selatan mencatatkan angka *Gini Ratio* yang cukup tinggi sebesar 0,418, bahkan melampaui rata-rata nasional Indonesia yang berada di angka 0,392. Kondisi ini jauh lebih mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan provinsi di Pulau Kalimantan, seperti Kalimantan Timur, yang pada periode yang sama hanya memiliki tingkat ketimpangan sebesar 0,3315.

Meskipun dalam kurun waktu 2017 hingga 2023 Sulawesi Selatan berhasil menekan angka ketimpangan secara konsisten hingga menyentuh 0,377, tantangan besar masih terlihat pada sisi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, laju PDRB Sulawesi Selatan tercatat sebesar 3,37, nilai ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 3,93 dan jauh tertinggal dibandingkan Sulawesi Tengah yang mampu mencapai pertumbuhan eksponensial sebesar 10,62. Fenomena ini menunjukkan adanya risiko stagnasi di mana penurunan ketimpangan tidak dibarengi dengan akselerasi pertumbuhan yang kompetitif.

Ketimpangan di Sulawesi Selatan juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah pusat ekonomi lain seperti DKI Jakarta. Jika DKI Jakarta memiliki *Gini Ratio* yang terus meningkat hingga 0,431 pada 2023 karena konsentrasi sektor jasa dan finansial, Sulawesi Selatan justru menghadapi tantangan ketimpangan yang berakar pada disparitas akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Rendahnya produktivitas di sektor pertanian di wilayah perdesaan Sulawesi Selatan dibandingkan sektor industri di perkotaan memperlebar jurang pendapatan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengisi *research gap* yang ada. Sebagian besar kajian terdahulu hanya fokus pada analisis parsial tanpa menempatkan Sulawesi Selatan dalam konteks komparasi yang luas. Dengan mengintegrasikan variabel otonomi fiskal, investasi, dan kualitas pembangunan manusia, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mengapa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya mampu menjadi motor penggerak pemerataan kesejahteraan yang signifikan secara statistik sebagaimana yang dapat kita lihat pada Tabel 1.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi (Y1) dan ketimpangan pendapatan (Y2). Kerangka berpikir ini mengajukan hipotesis bahwa kedua kondisi tersebut dipengaruhi oleh lima variabel independen utama: Derajat Otonomi Fiskal (X1), Rasional Pajak (X2), Produktivitas Tenaga Kerja (X3), Investasi (X4), dan Indeks Pembangunan Manusia (X5). Untuk menguji dan mengukur kompleksitas hubungan antar variabel tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode Analisis Jalur (Path Analysis). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengidentifikasi

pengaruh langsung dari setiap faktor terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, tetapi juga untuk mengungkap adanya efek tidak langsung yang mungkin terjadi melalui variabel perantara. Pada akhirnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kelima faktor tersebut secara simultan membentuk laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan di wilayah studi. Untuk menghindari ambiguitas, definisi operasional dan satuan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 2.

Pertumbuhan ekonomi (Y_1) dan ketimpangan pendapatan (Y_2) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi derajat otonomi fiskal daerah (X_1), rasionalisasi pajak (X_2), produktivitas tenaga kerja (X_3), investasi (X_4), dan ipm (X_5). Memahami hubungan ini penting untuk merancang kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hubungan antar variabel kerangka pikir pada penelitian ini pada gambar 1.

Metode Analisis Data Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif yang mencakup berbagai elemen yang melibatkan perhitungan numerik untuk menganalisis dan menjelaskan masalah. Metode yang digunakan adalah "Path Analysis dengan SmartPLS". Metode analisis data yang digunakan mencakup beberapa tahapan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka, analisis berbagai teori yang berhubungan dengan topik penelitian dari sumber-sumber seperti buku, jurnal dan referensi lain yang relevan, serta data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan dan badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan.

1. Persamaan Struktur Model

Pertumbuhan dan Ketimpangan Pendapatan

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e_1 \dots (1)$$

$$Y_2 = \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \gamma_3 X_3 + \gamma_4 X_4 + \gamma_5 X_5 + \gamma_6 Y_1 + e_2 \dots (2)$$

Keterangan:

Y_1 : Pertumbuhan Ekonomi

Y_2 : Ketimpangan Pendapatan

X_1 : Derajat Otonomi Fiskal Daerah

X_2 : Rasionalisasi Pajak

X_3 : Produktivitas Tenaga Kerja

X_4 : Investasi

X_5 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

β_1 Sampai β_5 dan γ_1 sampai γ_5 : Koefisien jalur dari masing-masing variabel bebas ke variabel terikat

γ_6 : Koefisien pengaruh ke Variabel terikat

e_1 dan e_2 : Error atau residual, yaitu pengaruh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model

2. Efek tidak langsung (indirect effect)

Efek tidak langsung terjadi ketika variabel bebas mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui variabel mediasi pertumbuhan ekonomi.

Rumusnya:

$$\text{Indirect Effect } X \rightarrow Y2 = \beta_i X \gamma_6 \dots (3)$$

Untuk masing-masing variabel:

- a) Dari X1 ke Y2 melalui Y1: $\beta_1 X \gamma_6$
- b) Dari X2 ke Y2 melalui Y1: $\beta_2 X \gamma_6$
- c) Dari X3 ke Y2 melalui Y1: $\beta_3 X \gamma_6$
- d) Dari X4 ke Y2 melalui Y1: $\beta_4 X \gamma_6$
- e) Dari X5 ke Y2 melalui Y1: $\beta_5 X \gamma_6$

3. Efek Total (Total Effect)

Efek Total adalah jumlah dari pengaruh secara langsung maupun pengaruh secara tidak langsung suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Efek total menunjukkan keseluruhan pengaruh yang dimiliki satu variabel terhadap variabel lain, baik secara langsung maupun melalui variabel perantara.

$$\text{Total Effect } X4 \rightarrow Y2 = \gamma_4 + (\beta_4 X \gamma_6) \dots (4)$$

Penjelasan:

- a) γ_4 : efek secara langsung dari investasi terhadap ketimpangan pendapatan
- b) $\beta_4 X \gamma_6$: efek tidak langsung dari investasi terhadap ketimpangan melalui pertumbuhan ekonomi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemilihan model path analysis

Berdasarkan hasil Uji Bootstrapping yang ditampilkan, kita dapat menguji signifikansi statistik hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam model. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara Investasi (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y1).

Berdasarkan uji bootstrapping tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara Derajat Otonomi Fiskal Daerah (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y1) memiliki nilai p-value = 0,006. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka hubungan tersebut dinyatakan signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal melalui derajat otonomi daerah merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, variabel Investasi (X4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1) menunjukkan p-value sebesar 0,585, yang berarti pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengoreksi argumen sebelumnya dan menegaskan bahwa dalam model penelitian ini, investasi belum menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan faktor otonomi fiskal.

Untuk variabel Rasional Pajak (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1), diperoleh nilai p-value sebesar 0,077. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dinyatakan tidak signifikan secara

statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan rasionalisasi pajak daerah belum mampu memberikan kontribusi yang kuat terhadap peningkatan PDRB di wilayah sampel selama periode pengamatan.

Selanjutnya, pada pengujian terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan (Y2), ditemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (Y1) memiliki p-value sebesar 0,207 terhadap Ketimpangan Pendapatan (Y2). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan. Kondisi yang sama juga ditemukan pada variabel Produktivitas Tenaga Kerja (X3) dengan p-value 0,939, Investasi (X4) terhadap ketimpangan dengan p-value 0,509, serta IPM (X5) dengan p-value 0,170, di mana semuanya tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y2).

Hasil path coefficients memperkuat temuan ini, di mana Derajat Otonomi Fiskal Daerah (X1) memiliki koefisien jalur terbesar yaitu 0,387. Hal ini menegaskan peran strategis kemandirian anggaran daerah dalam struktur ekonomi Sulawesi Selatan dibandingkan variabel independen lainnya.

Pembahasan

Hipotesis adalah asumsi tentatif yang kebenarannya harus diuji. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang relevan, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertumbuhan Ekonomi (Y1)
 - H1: Otonomi fiskal (X1) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1).
 - H2: Rasionalisasi pajak daerah (X2) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1).
 - H3: Investasi (X4) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1).
 - H4: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X5) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1).
2. Hipotesis Ketimpangan Pendapatan (Y2)
 - H5: Produktivitas tenaga kerja (X3) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Y2).
 - H6: Investasi (X4) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Y2).
 - H7: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X5) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Y2).
 - H8: Pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Y2).

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk dampak signifikan dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi pada 2020. Meskipun demikian, sejak 2021 terlihat tren pemulihan ekonomi, meski belum mencapai puncak seperti pada 2017 (BPS, 2023). Secara berpikir, sesuai dengan pandangan neoklasik, investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci pertumbuhan berkelanjutan. Kebijakan

stimulus fiskal dan pembangunan infrastruktur turut mempercepat pemulihan (Suparmoko, 2015). Meskipun demikian, ketimpangan khususnya antara perkotaan dan pedesaan, masih menjadi ujian utama dalam mengujudkan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh (Pananrangi, 2012).

Ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan menunjukkan tren penurunan, ditandai dengan turunnya Koefisien Gini dari 0,407 pada tahun 2017 menjadi 0,377 pada tahun 2023 (BPS, 2023). Meskipun demikian, ketimpangan masih terjadi, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang disebabkan oleh perbedaan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja. Temuan ini sejalan dengan Hipotesis Kuznets, di mana ketimpangan meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi dan menurun seiring perkembangan. Urbanisasi yang pesat memperlebar jurang antara sektor perkotaan dan pedesaan (Yanto, 2023). Selain itu, ketimpangan antar kelas sosial juga meningkat, terutama di daerah urban. Oleh karena itu, kebijakan redistribusi pendapatan serta peningkatan akses pendidikan dan kesempatan kerja sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Derajat otonomi fiskal memberikan pemerintah daerah kewenangan lebih besar dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, memungkinkan penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Di Sulawesi Selatan, peningkatan otonomi fiskal berkontribusi pada peningkatan PAD, pembangunan infrastruktur, dan efisiensi pelayanan publik, yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif (Pemprov Sulsel, 2023). Namun, tantangan utama terletak pada kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan ketat dan transparansi anggaran sangat diperlukan untuk mencegah korupsi serta memastikan efektivitas penggunaan dana publik dalam mendorong pembangunan berkelanjutan (Surgawati, 2021).

Pajak yang rasional sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di Sulawesi Selatan, peningkatan pajak tahun 2020 menunjukkan peningkatan penerimaan daerah, meskipun penerapannya belum merata di seluruh sektor, terutama sektor pertanian yang kontribusinya masih rendah (Soekianto, 2020). Sistem perpajakan yang adil dan efisien diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan investasi, sekaligus mengurangi ketimpangan sosial. Dengan demikian, reformasi pajak menjadi instrumen strategi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Surgawati, 2021).

Produktivitas tenaga kerja adalah faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di Sulawesi Selatan, terjadi disparitas produktivitas antara sektor industri di wilayah perkotaan dan sektor pertanian di pedesaan. Rendahnya produktivitas di sektor pertanian disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan rendahnya keterampilan tenaga kerja (Pananrangi, 2012). Untuk mengatasi ketimpangan ini, perlu penguatan pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan, khususnya di sektor berbasis sumber daya alam. Peningkatan kualitas tenaga kerja akan mendorong produktivitas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan mengurangi ketimpangan antar sektor (Surgawati, 2021).

Investasi publik dan swasta memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Pada periode 2021–2023, terjadi peningkatan signifikan investasi, khususnya di sektor infrastruktur, energi terbarukan, dan industri pengolahan, yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas produksi (Soekianto, 2020). Namun, konsentrasi investasi swasta di wilayah perkotaan memicu ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, alokasi investasi publik perlu difokuskan pada sektor strategis pedesaan, seperti pertanian berkelanjutan dan pariwisata, serta pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas dan pemerataan manfaat ekonomi. Prosedur investasi yang lengkap akan memperkuat daya saing wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal (Pananrangi, 2012).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan signifikan pada 2017–2023, yang mencerminkan kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Kemajuan ini didorong oleh kebijakan pembangunan manusia yang fokus pada akses pendidikan dan layanan kesehatan. Meski demikian, diagram antar wilayah, terutama antara perkotaan dan pedesaan, masih menjadi tantangan utama. Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan pemerataan pembangunan manusia, yang akan berdampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Smitha, 2015).

Berdasarkan hasil uji hipotesis, ditemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (Y1) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan (Y2) di lima kabupaten/kota sampel dengan nilai *p-value* sebesar 0,207. Secara empiris, meskipun data makro menunjukkan adanya tren penurunan *Gini Ratio* di Sulawesi Selatan dari 0,418 pada tahun 2017 menjadi 0,377 pada tahun 2023, hasil statistik membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah faktor pendorong utama di balik penurunan tersebut.

Temuan ini memberikan gambaran unik terkait Hipotesis Kuznets. Secara sekilas, penurunan ketimpangan seiring berjalannya waktu pertumbuhan menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan seolah-olah telah melewati puncak kurva 'U-terbalik' dan mulai memasuki fase di mana pertumbuhan ekonomi mulai diikuti dengan pemerataan pendapatan. Namun, karena hasil uji *path analysis* menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa penurunan ketimpangan di Sulawesi Selatan tidak terjadi secara otomatis melalui *trickle-down effect* dari pertumbuhan ekonomi semata.

Sebaliknya, fenomena ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non-pertumbuhan atau kebijakan struktural lainnya. Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa Derajat Otonomi Fiskal (X1) memiliki pengaruh signifikan ($p=0,006$) terhadap struktur ekonomi daerah. Dengan demikian, peran pemerintah daerah melalui kemandirian fiskal dan distribusi anggaran belanja daerah terbukti lebih efektif dalam mengintervensi ketimpangan dibandingkan hanya mengandalkan laju pertumbuhan ekonomi makro.

Tabel dan Gambar

Tabel 1. Perbandingan PRDB dan Gini Ratio di Provinsi Sulawesi selatan dan Provinsi Se-Indonesia Tahun 2017-2023

38 Provinsi	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Gini Ratio	PDRB	Gini Ratio	PDRB	Gini Ratio	PDRB	Gini Ratio	PDRB	Gini Ratio	PDRB	Gini Ratio	PDRB	Gini Ratio	PDRB
ACEH	0.329	2.31	0.3215	2.79	0.32	3.45	0.321	0.71	0.3235	1.35	0.301	2.78	0.296	2.83
SUMATERA UTARA	0.325	3.95	0.3145	4.06	0.316	3.61	0.315	-1.84	0.3135	1.12	0.319	3.28	0.309	3.6
SUMATERA BARAT	0.315	4.07	0.313	3.95	0.3065	3.14	0.303	-2.33	0.303	1.85	0.296	2.88	0.28	3.17
RIAU	0.325	0.24	0.337	-0.01	0.3325	2.51	0.325	6.03	0.3265	1.87	0.3245	3.13	0.324	2.84
JAMBI	0.3345	2.93	0.3345	3.07	0.3225	4.46	0.318	0.27	0.318	2.32	0.3275	3.77	0.343	3.35
SUMATERA SELATAN	0.363	4.16	0.3495	4.7	0.335	4.11	0.3385	0.53	0.3405	2.3	0.3345	4.04	0.338	3.93
BENGKULU	0.35	3.38	0.3585	3.42	0.3345	4.49	0.3285	-1.7	0.3235	1.9	0.315	2.94	0.333	2.95
LAMPUNG	0.3335	4.09	0.336	4.21	0.33	4.18	0.3235	-7.43	0.3185	1.51	0.3135	3.04	0.324	3.34
KEP. BANGKA BELITUNG	0.279	2.35	0.2765	2.37	0.2655	3.95	0.2595	-2.33	0.2515	3.62	0.2455	2.98	0.245	3.01
KEP. RIAU	0.3465	-0.69	0.3345	1.83	0.339	-0.08	0.3365	4.77	0.341	1.85	0.3335	3.5	0.34	3.63
DKI JAKARTA	0.411	5.21	0.392	5.16	0.3925	5.46	0.3995	-2.7	0.41	2.89	0.4175	4.91	0.431	4.65
JAWA BARAT	0.398	3.89	0.406	4.25	0.4	4.3	0.4005	-0.77	0.409	2.5	0.4145	4.24	0.425	3.83
JAWA TENGAH	0.365	4.52	0.3675	4.59	0.3595	5.17	0.3605	-7.71	0.37	2.3	0.37	4.26	0.369	3.96
DI YOGYAKARTA	0.436	4.11	0.4315	5.06	0.4255	4.78	0.4355	2.76	0.4385	4.91	0.449	4.45	0.449	4.4
JAWA TIMUR	0.4055	4.87	0.375	4.92	0.367	4.88	0.365	-4.4	0.369	2.76	0.368	4.55	0.387	4.19
BANTEN	0.3805	3.67	0.376	3.75	0.363	5.06	0.364	3.48	0.364	3.16	0.37	3.78	0.368	3.61
BALI	0.3815	4.41	0.3705	5.18	0.368	3.9	0.369	-8.26	0.3765	-3.19	0.3625	4.1	0.362	5.01
NUSA TENGGARA BARAT	0.3745	-1.11	0.3815	-5.61	0.3765	1.1	0.381	-3.49	0.3825	0.75	0.3735	5.26	0.375	0.22
NUSA TENGGARA TIMUR	0.359	3.44	0.355	3.46	0.3555	3.98	0.355	1.56	0.3425	0.89	0.337	1.43	0.325	1.87
KALIMANTAN BARAT	0.328	3.66	0.332	3.62	0.3225	4.17	0.321	-8.26	0.314	3.37	0.3125	3.65	0.321	3.09

38 Provinsi	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Gini Ratio	PDRB	Gini Ratio	PDRB	Gini Ratio	PDRB	Gini Ratio	PDRB	Gini Ratio	PDRB	Gini Ratio	PDRB	Gini Ratio	PDRB
KALIMANTAN TENGAH	0.335	4.47	0.343	3.43	0.3355	6.53	0.3245	-1.91	0.3215	2.17	0.314	5.01	0.317	2.77
KALIMANTAN SELATAN	0.347	3.64	0.342	3.5	0.334	3.26	0.3415	1.9	0.3275	2.12	0.313	3.76	0.313	3.54
KALIMANTAN TIMUR	0.3315	0.99	0.342	0.58	0.3325	5.54	0.3315	-6.43	0.3325	1.28	0.322	3.04	0.322	4.78
KALIMANTAN UTARA	0.3105	2.98	0.3035	1.63	0.2935	10.09	0.296	-1.67	0.2885	2.48	0.271	3.84	0.277	3.53
SULAWESI UTARA	0.395	5.27	0.383	5	0.3715	5.24	0.369	-5.65	0.362	3.28	0.362	4.58	0.37	4.66
SULAWESI TENGAH	0.35	5.49	0.3315	18.8	0.3285	7.7	0.3235	7.13	0.321	10.3	0.3065	13.9	0.304	10.62
SULAWESI SELATAN	0.418	6.17	0.3925	6.05	0.39	6.33	0.3855	-3.28	0.3795	3.46	0.371	3.93	0.377	3.37
SULAWESI TENGGARA	0.399	4.65	0.4005	4.34	0.396	6.1	0.3885	1.13	0.392	2.41	0.3765	3.79	0.371	3.65
GORONTALO	0.4175	5.14	0.41	4.94	0.4085	7.23	0.407	0.6	0.4085	1.15	0.4205	2.74	0.417	3.22
SULAWESI BARAT	0.3465	4.43	0.368	4.33	0.365	5.27	0.36	-6.2	0.361	1.02	0.3665	0.71	0.351	3.65
MALUKU	0.332	4.05	0.3345	4.17	0.322	5.72	0.322	-4.95	0.315	2.19	0.3035	3.89	0.288	3.82
MALUKU UTARA	0.3235	5.59	0.332	5.82	0.311	5.99	0.299	1.81	0.289	15	0.294	21.2	0.3	19.87
PAPUA BARAT	0.3885	1.52	0.3925	3.75	0.3835	-0.13	0.379	-15.4	0.377	-2.14	0.377	0.36	0.37	3.47
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24
PAPUA	0.3975	2.78	0.391	5.47	0.3925	-16.4	0.3935	-20.1	0.3965	13.4	0.3995	7.39	0.386	2.85
PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.72
PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.42
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.37
INDONESIA	0.392	3.79	0.3865	3.93	0.381	4.27	0.383	-3.03	0.3825	2.52	0.3825	4.15	0.388	3.93

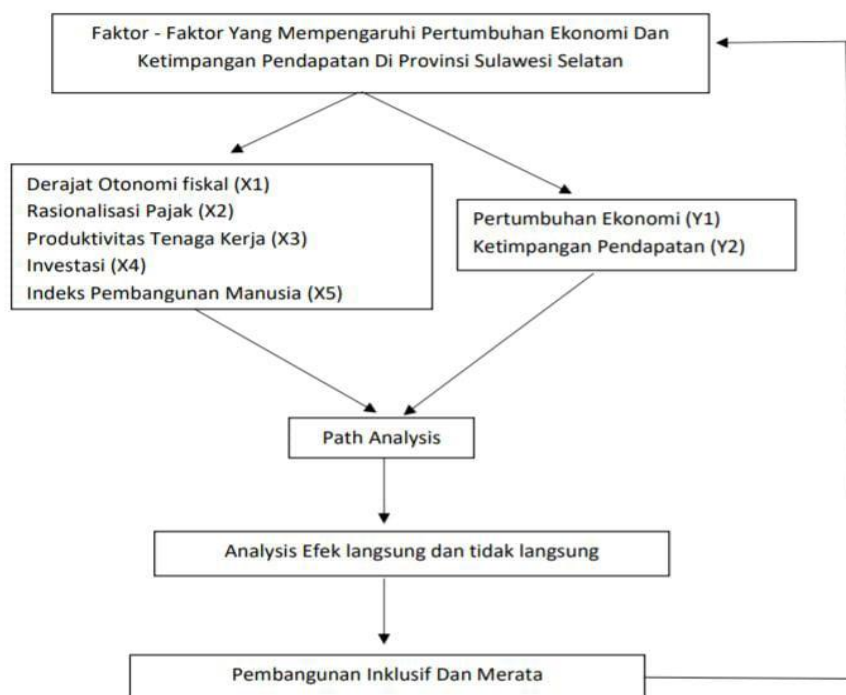
Tabel 2. Tabel Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Definisi Operasional	Satuan
Derajat Otonomi Fiskal	X1	Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan sendiri yang diukur dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah.	Persen (%)
Rasio Pajak	X2	Tingkat efektivitas dan rasionalisasi pemungutan pajak daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.	Persen (%)
Produktivitas Tenaga Kerja	X3	Kontribusi tenaga kerja terhadap output daerah, seringkali dikaitkan dengan sektor industri dan pertanian.	Jiwa/ Nilai
Investasi	X4	Total penanaman modal publik dan swasta yang masuk ke wilayah kabupaten.	Rupiah
IPM	X5	Kualitas pembangunan manusia berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.	Indeks
Pertumbuhan Ekonomi	Y1	Laju kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahunan.	Persen (%)
Ketimpangan Pendapatan	Y2	Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat yang diukur melalui Gini Ratio.	Indeks

Tabel 3. Hasil Uji Bootstrapping untuk Signifikansi

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Derajat otonomi fiskal daerah -> Pertumbuhan Ekonomi	0.387	0.143	0.141	2.743	0.006
Rasional Pajak -> Pertumbuhan Ekonomi	0.206	0.206	0.116	1.768	0.077
Produktivitas Tenaga Kerja -> Ketimpangan Pendapatan	-0.012	0.008	0.153	0.076	0.939
Investasi -> Pertumbuhan Ekonomi	0.045	0.063	0.083	0.545	0.585
Investasi -> Ketimpangan Pendapatan	-0.148	-0.114	0.224	0.66 0	0.509
IPM -> Ketimpangan Pendapatan	-0.199	-0.190	0.145	1.373	0.170
Pertumbuhan Ekonomi -> Ketimpangan Pendapatan	0.183	0.193	0.145	1.261	0.207

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS4, 2025



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

SIMPULAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode pengamatan 2017–2023. Variabel yang diamati meliputi variabel bebas X_1 – X_5 (derajat otonomi fiskal daerah, rasionalisasi pajak, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan IPM) serta variabel terikat Y_1 (pertumbuhan ekonomi) dan Y_2 (ketimpangan pendapatan).

Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode pengambilan sampel dalam penelitian di mana peneliti memilih subjek penelitian berdasarkan kriteria kelengkapan data periode 2017–2023, variasi kondisi geografis dan ekonomi, serta stabilitas administratif. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Gowa, Takalar, Maros, Sinjai, dan Luwu Utara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh variabel lain seperti faktor investasi, derajat otonomi fiskal, produktivitas tenaga kerja, rasiona pajak, dan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia menunjukkan yang lemah atau tidak signifikan. Investasi telah terbukti menjadi pendorong utama untuk meningkatkan GRDP regional, yang mencerminkan pentingnya alokasi modal dalam pembangunan ekonomi regional.

Sementara itu, dukungan pendapatan telah menunjukkan penurunan tren selama periode 2017–2023. Gini Ratio dari 0,407 menjadi 0,377. Namun demikian, ketimpangan masih terjadi, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, akibat ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar lainnya. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan secara statistik tidak signifikan, menandakan bahwa peningkatan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pemerataan kesejahteraan.

Meskipun ada kemajuan dalam aspek pertumbuhan ekonomi, tantangan utama tetap untuk mengatasi kesenjangan pendapatan. Termasuk mengoptimalkan investasi, meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat kemampuan anggaran regional harus menjadi prioritas politik untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Saran untuk penelitian di masa akan datang perlukan penambahan variabel atau faktor lain dalam penelitian selanjutnya untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, seperti kebijakan sosial, distribusi ekonomi, dan akses terhadap layanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Idham A. Pananrangi. (2012). 749-Article Text-1398-1-10-20160224.
- Afifah Bianti Effendy. (2019). *Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode Tahun 2011 - 2017*.
- Amir Salim, F. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari. [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id),
- Firmansyah, A. (2022). Peran Rasionalisasi Pajak Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia: Pendekatan Panel Data. *Jurnal Fiskal Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 75-89.
- Hendrawan, H., & Yanto, Y. (2023). Pengaruh Tingkat Kesehatan, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Per Kapita, Ketimpangan Pendapatan, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Indeks Kebahagiaan Di Indonesia. *Jurnal Riset Pembangunan*, 6(1), 24-38.
- Irvi Nurul Husna, A. (2020). Kebijakan Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia. *Muttaqien; Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 43-55. <https://doi.org/10.52593/Mtq.01.1.03>
- M. Suparmoko. (2015). Pengantar Ekonomi Makro.
- Nugroho, V., Oktrina, L., & Soekianto, T. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 88-94.
- Nursa Fitri, Junaidin Zakaria, & Hasbi. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Antar Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019. 8(1). [Http://Pasca-Umi.Ac.Id/Index.Php/Tata](http://pasca-umi.ac.id/index.php/tata)
- Putri, N. K., & Andika, R. (2020). Pengaruh Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 45-56.
- Rizki, R., & Haryanto, A. (2021). Analisis Ipm Dan Ketimpangan Pendapatan Di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(3), 211-222.
- Safrial S. (2024). Skripsi Analisis Strategi Pengembangan Umkm Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Banda Aceh
- Sari, M. D., & Nugroho, B. (2019). Pengaruh Investasi Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 13(2), 112-124.
- Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. 12th Edition / Michael P. Todaro; Stephen C. Smith.
- Song, Y., Gao, J., & Zhang, M. (2023). Study On The Impact Of Energy Poverty On Income Inequality At Different Stages Of Economic Development: Evidence From 77 Countries Around The World. *Energy*, 282. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.128816>

Surgawati, I. (2021). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia Menjelang 20 Tahun Otonomi Daerah. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 75-85.